

# **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah *Ma'diyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)**

Oleh: Fitri Gamelia Harahap

## **Abstrak**

*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama masa perkawinan. Namun apabila suami lalai dalam memberi nafkah maka istri berhak menuntut pengembalian atas nafkah ma'diyah nya.*

*Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah ma'diyah dalam perkara cerai gugat? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah ma'diyah dalam perkara cerai gugat? 3) Bagaimana perbandingan mengenai nafkah ma'diyah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*

*Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai nafkah ma'diyah yakni menurut ulama Hanafiyah nafkah ma'diyah istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumbuh ulama nafkah ma'diyah menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan dalam hukum positif adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah ma'diyah itu wajib dibayar atau tidak. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah ma'diyah yakni bergantung pada keputusan hakim yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan dalil – dalil hukum yang ada.*

**Kata Kunci :** *Nafkah, Ma'rifah, Perceraian.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada pencipta-Nya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>3</sup> Sehingga menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>4</sup> Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilihat dalam beberapa ayat al-quran dan hadits.

Adapun kewajiban suami terhadap istri dibagi kepada dua bagian :

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.....

Artinya : .....*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,....*<sup>5</sup> (Q.S. Al Baqarah : 233)

Dalam ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut : yakni (1) makanan, (2) pakaian dan (3) tempat tinggal.<sup>6</sup> Dan dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ - قَالَ  
فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya :”*Dari Jabir r.a, Nabi SAW bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istri menurut yang patut (H.R. Muslim)*<sup>7</sup>

Dalam hadits riwayat lain disebutkan,

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا  
يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ

جُنَاحٌ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْتِكَ. (رواه مسلم)

Artinya :*“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, dan berkata, “Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah seorang yang kikir Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah dengan perbuatan tersebut aku berdosa?” Maka Rasulullah bersabda, Ambillah apa yang mencukupi bagi mu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)<sup>8</sup>.*

Ayat Al-Qur’an dan beberapa Hadits tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadits tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, akal pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya. Sebagai kesimpulan akal pikiran terbuka untuk berbeda pendapat, karena bergantung pada sisi tepat permasalahan.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan diharamkan dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Kewajiban dan tanggungjawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang yang mampu secara materil. Dan apabila baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat sebagian besar hanya meminta nafkah iddah dan mut'ah saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut salah satunya menuntut persoalan nafkah *ma'ad<sup>al</sup>iyah*.

Nafkah *ma'ad<sup>al</sup>iyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu atau pada saat masih berlangsungnya perkawinan yang seharusnya diberikan namun hingga sekarang belum terbayarkan. Oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi akibat kelalaian suami, maka istri dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun penulis dalam Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Nafkah *ma'afiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah *ma'afiyah* dalam perkara cerai gugat ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah *ma'afiyah* dalam perkara cerai gugat ?
- 3) Bagaimana perbandingan mengenai nafkah *ma'afiyah* dalam persektif hukum Islam dan hukum positif ?

## 3. Kerangka Pemikiran

Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan.<sup>10</sup> Dalam definisi lain Tahir Mahmud mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip – prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan pemberian mas kawin, perwalian dan lain-lain.<sup>11</sup>

Ikatan perkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak dan kewajiban antara suami istri, Kedua hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, dan ketiga hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Dalam hal ini yakni orang tua, saudara kandung dan keluarga semenda lainnya.

Undang – undang perkawinan meletakkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat dari suatu perkawinan yakni:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan.<sup>12</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Hukum memberikan nafkah tersebut adalah wajib. Dalam Al Quran tercantum dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 233 dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kewajiban seorang suami memberikan nafkah tercantum dalam pasal 34 ayat 1 *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Maka suami tidak bisa meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Pada saat akad perkawinan seorang suami mengucapkan suatu perjanjian perkawinan yang biasa disebut dengan taklik talak, adapun isi dari taklik talak tersebut yaitu<sup>13</sup>;

Apabila saya :

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) Menyakiti bada atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudia istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Dari shigat talak tersebut bahwa seorang suami mengikat dengan suatu perjanjian apabila dirinya tidak memberikan nafkah kepada istri maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, dalam ini apakah nafkah yang tidak dibayarkan selama perkawinan menjadi hutang bagi suami kepada istrinya, seperti mahar yang belum dibayarkan, dan bagaimana konsekuensi hukum bagi suami yang lalai terhadap kewajibannya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah *ma'adhiyah* terdiri dari dua kata yakni nafkah dan *ma'adhiyah*. Nafkah berarti belanja sedang *ma'adhiyah* (ماضي) berasal dari bahasa arab yang memiliki arti lampau, yang telah lewat atau yang telah lalu.<sup>14</sup> Nafkah *Ma'adhiyah* adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Nafkah *ma'adhiyah* merupakan istilah yang digunakan pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau. Nafkah *ma'adhiyah* juga dikenal dengan istilah nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak terbayarkan.<sup>15</sup>

Pernikahan menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Mahar dan nafkah merupakan hal yang paling penting menonjol kewajiban suatu atas istri. Mahar diberikan hanya pada saat akad perkawinan atau sebelum hubungan badan dilakukan. Karena mahar merupakan tanda suka rela istri terhadap suaminya. Sedang nafkah wajib diberikan



sepanjang masa perkawinan, karena selama masa perkawinan istri tidak dapat bertindak tanpa persetujuan suami.

Nafkah apabila tidak ditunaikan maka menjadi hutang bagi suami. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nafkah yang belum ditunaikan suami terhadap istrinya. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga wajib memberikan nafkah setelah perceraian.<sup>16</sup> Apabila suami telah menjalankan kewajibannya maka istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu terhadap suaminya. Namun apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah maka hal tersebut merupakan kesalahan dan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka menjadi hutang dan wajib dilunasi dikemudian hari.

Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai nafkah *ma'adhiyah* ini. Dasar hukum yang digunakan untuk nafkah *ma'adhiyah* ini adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan nafkah yang tercantum dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam hal – hal berkaitan dengan nafkah tercantum dalam Pasal 80 ayat 4 berbunyi : “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.”

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri bisa melalui dengan dua cara, yakni :

1. Tamkin, adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.
2. Tamlik, adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri.

Nafkah *ma'adhiyah* ini terjadi akibat belum ditunaikannya memberi nafkah yang berlangsung dalam waktu yang begitu lama sehingga istri mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah ini tidak akan gugur sampai waktu tertentu, misal apabila terjadi perceraian suami telah menunaikan kewajiban nafkah telah yang menjadi hutang terhadap istrinya, istri membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa iddah, dan anak telah mampu menghidupi dirinya sendiri.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Permohonan Nafkah *Ma'adhiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat**

Syariat telah mewajibkan nafkah terhadap suami atas istri dan anaknya berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW. Suami telah berkewajiban menanggung segala kebutuhan anak dan istrinya dalam hal nafkah, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan mereka oleh karenanya istri pun memiliki kewajiban untuk mengelola nafkah yang diberikan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan keluarganya.

Kewajiban memberi nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tak pernah gugur dan seorang suami dan seorang ayah juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun istrinya merupakan orang kaya. Kewajiban memberi nafkah ini tidak akan

pernah gugur sampai ada uzur yang menggugurkan nafkah atas istri.

Ada beberapa kondisi suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan berikut :

- 1) Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang kesulitan
- 2) Suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia dalam keadaan lapang dalam segi ekonomi.

Adanya kelalaian untuk memberi nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar sehingga menjadi permasalahan dalam masyarakat Islam. Dalam kondisi demikian pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Kelalaian seseorang untuk memberi nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu menimbulkan *mud{arat* pada diri orang yang wajib dinafkahinya.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan *mud{arat* atas diri atau harta orang lain. Diantara upaya mengantisipasi ialah dengan kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi dan ancaman hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari fisik atau kejiwaan. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya *mud{arat* yang ditimbulkan suatu perbuatan.<sup>18</sup>

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>19</sup>

Kemudian dalam Q.S At-Talaq : 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan<sup>20</sup>

Ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah atas istrinya sebagai ganti hidup bersama. Namun ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengajukan cerai gugat kepada suami karena penelantaran ekonomi.<sup>21</sup>

Pendapat pertama, hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istri tidak boleh menggugat cerai kepada suami. Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri berhutang atas tanggungan suaminya.<sup>22</sup> Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang kepada orang lain atas suaminya. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa para sahabat Nabi ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Tapi Nabi tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat dengan alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi tidak pernah memberitahu bahwa cerai gugat adalah haknya. Kalau betul menurut syara' istri

memiliki hak cerai gugat dengan sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada Rasul.<sup>23</sup>

Dalam hal apabila suami tidak memberi nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Karena itu hakim tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka, disebabkan karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah.<sup>24</sup>

Pendapat kedua, hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Apabila suami tidak sanggup memenuhi ekonomi keluarga/nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim. Konsekuensinya adalah, ketiadaan nafkah bagi istri karena suami seorang miskin ataupun suami seorang yang memiliki kemampuan, maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap gugatan cerai yang terjadi antara suami istri tidak termasuk talaq. Karena gugatan tersebut terjadi atas permintaan istri kepada suami melalui hakim dan hakim berhak untuk memisahkan keduanya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi cerai gugat itu sama artinya dengan pembatalan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri yang diajukan oleh istri yaitu semacam perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama karena istrinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap suaminya.<sup>25</sup>

Mengenai masalah ini, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemudian lelaki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka ia

boleh memilih kalau ia mau ia tetap dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, atau kalau ia mau ia boleh untuk meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu memberikan kepadanya nafkah pelayanan dan juga berupa lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah seperti makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh untuk menuntut cerai gugat melalui hakim.<sup>26</sup>

Nafkah *ma'adhiyah* adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Tuntutan atas nafkah *ma'adhiyah* kepada suami ini berdasarkan kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya padahal ia dalam keadaan mampu. Kemudian mengenai nafkah *ma'adhiyah* atau nafkah masa lampau para ulama juga berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya mendesak kepada suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan.<sup>27</sup> Nafkah istri baru dianggap hutang yang harus dibayar suami dikemudian hari apabila telah ditetapkan menjadi hutang oleh pengadilan.

Alasannya, karena nafkah istri itu *s'illab* (dari satu sisi adalah pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti), dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti. Yang dimaksud tidak adanya pengganti adalah karena manfaat pengekangan istri kembali kepada suami istri bukan hanya bermanfaat bagi suami. Selain itu nafkah dianggap sebagai ganti penahanan istri pada hak suaminya. Melihat kemiripan dengan *s'illab* maka nafkah itu gugur dengan lewatnya masa

tanpa adanya pelunasan atau saling rela antar suami istri sebagai mana juga hukum nafkah kerabat.<sup>28</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan setiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat atau tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat masa sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkah kerabat.<sup>29</sup>

Kemudian dalam Q.S. Ath -Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam kitab Tafsir Ahkam Al Jas{as{ dijelaskan bahwa *لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ* Menunjukkan bahwa memberi nafkah itu diwajibkan kepada orang yang mampu untuk melakukannya dan pemberian nafkah bagi orang yang mengalami kesempitan tentu lebih sedikit dibanding nafkah yang diberikan dari orang yang berlimpah hartanya.

Kemudian dalam potongan ayat, *وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ* bermakna maka barang siapa yang sempit akan rezekinya maka bernafkahlah dari apa-apa yang didatangkan Allah SWT kepadanya, Allah SWT lebih mengetahui bahwasanya Dia tidak membebani nafkah meski dalam bentuk yang sedikit, namun merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memberi nafkah.

Dan dalam potongan ayat لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا dijelaskan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan dari apa yang menjadi kesanggupannya. Dan makna yang terkandung yakni jika tidak mampu dalam memberi nafkah Allah SWT tidak membebani infak dan apabila tidak dibebani infak dalam hal ini maka tidaklah terjadi perceraian antara suami istri. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa batalnya perkataan talak akibat atas orang yang tidak mampu dalam memberi nafkah pada istrinya. Maka jika dikatakan telah jatuh talak dari suami maka bagi suami harus melepaskan sebelum dijelaskan padanya bahwasanya ia tidak dibebani nafkah. Maka tidak boleh ada paksaan untuk talak dari waktu yang ditetapkan oleh istri karena didalamnya bermaksud untuk cerai yang merupakan bukan suatu alasan yang diwajibkan. Dan talak bukan merupakan bagian dari infak dan tidak masuk kedalam pembelanjaan, dan suami pun tidak ingin dibebani karena hal itu.

Dan dalam potongan ayat سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ menjelaskan bahwa setiap ada kesulitan maka kemudahan setelahnya.<sup>30</sup>

Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang kesulitan memberi nafkah maka dia tidak melakuka kezaliman, namun jika dia merupakan orang yang mampu dalam hal memberi nafkah namun melalaikan kewajibannya dalam hal itu, maka ia orang yang zalim sebab ketidak mauannya dalam memberi nafkah. Untuk mencegah kezalimannya itu bukan dengan cara berpisah dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya.<sup>31</sup> Pendapat ini dikuatkan bahwa tidak pernah ada hadits Nabi SAW bahwa beliau memberikan kesempatan bagi istri untuk membatalkan



perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah dan para sahabat perempuan tidak pernah ada yang meminta dipisahkan dengan suaminya akibat ketidakmampuan itu. Maka dari penjelasan inilah nafkah *ma'diyah* gugur.

Namun kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum terbayarkan baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana hanya setiap hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah sekian waktu lamanya.<sup>32</sup>

Alasannya yakni karena nafkah itu sebagai pengganti bukan *shillah* atau pemberian tanpa meminta ganti. Nafkah itu sudah diwajibkan atas suami oleh syariat sebagai pengganti penahanannya terhadap istri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi hutang.<sup>33</sup>

Sedangkan mengenai nafkah *ma'diyah* atau nafkah lampau anak menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah karena lewatnya masa maka nafkah terhadap anak gugur karena ternyata anak tersebut sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih dan kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak serta anak tersebut tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhannya pada masa tersebut dalam arti dia mampu untuk memenuhinya maka mayoritas ulama berpendapat ayah tidak berhutang dengan alasan anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedang kewajiban nafkah atas diri ayahnya. Namun apabila anak tersebut tidak mempunyai dana sendiri dan berdasarkan keputusan hakim nafkah tersebut menjadi hutang, maka dalam hal ini ayah dianggap berhutang atas nafkah yang belum dibayarkannya.<sup>34</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Terhadap Terhadap Permohonan Nafkah *Ma'afiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat

Perceraian terjadi akibat baik suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak ditunaikan maka akan menyebabkan perselisihan antara keduanya. Dalam hukum positif hal-hal yang menjadi alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 diantaranya<sup>35</sup> :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kita memahami bahwa terselenggaranya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yang paling menonjol adalah pemberian mahar dan nafkah. Nafkah wajib diberikan sepanjang perkawinan berlangsung. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami ataupun istri maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun gugatan mengenai nafkah *ma'adhiyah* atau nafkah lampau dalam h ini baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus. Undang – Undang Perkawinan hanya mencatut apabila suami istri melalaikan kewajiban maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri<sup>36</sup> . Maka dalam hal ini keputusan mengenai nafkah *ma'adhiyah* atau nafkah lampau hanya dapat diputuskan berdasarkan keputusan hakim.

Dalam putusan mengenai nafkah *ma'adhiyah* ini tidak selalu tuntutan terhadap nafkah *ma'adhiyah* dikabulkan. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formil.

Nafkah *ma'adhiyah* yang merupakan nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh suami menurut jumhur ulama merupakan hutang yang harus dibayarkan. Namun, karena dalam hal ini tidak diatur kedudukannya dalam hukum positif dan harus berdasarkan putusan hakim maka agar memiliki ketetapan hukum.

Gugatan mengenai nafkah *ma'adhiyah* dapat disertai dengan perceraian maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh

undang-undang untuk melakukan gugatan balik atau rekonsiliasi atas nafkah *ma'afiyah*. Suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila dalam persidangan seorang suami terbukti dan dalam kenyataannya ia tidak mampu baik secara fisik, mental dan secara materi dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya. Lainnya hanya apabila suami dalam keadaan mampu, namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal memberi nafkah. Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi suami.<sup>37</sup> Pendapat ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg mengenai nafkah *ma'afiyah*.

Namun dalam berbagai halnya dengan nafkah *ma'afiyah* anak, dalam putusan perdata agama dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 608/K/AG/2003 berpendapat bahwa gugatan istri terhadap nafkah *ma'afiyah* anak tidak dapat diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan menjadi hak milik sepenuhnya bagi sang anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat.<sup>38</sup> Jika ditinjau dalam aspek perlindungan terhadap anak menurut hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam memperoleh kepemilikan harta benda, dan hak memperoleh pendidikan.<sup>39</sup>

Namun apabila dalam kenyataannya selama dalam kurun waktu tertentu ayah tidak memberikan nafkah kepada

anak namun, hak-hak anak telah terpenuhi dari ibu maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur.<sup>40</sup> Lain hanya apabila dalam waktu kurun tertentu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan dalam waktu tertentu anak dalam keadaan membutuhkan nafkah dan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja atau dalam kondisi sakit yang menjadikan terhangnya pemberian nafkah sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan maka hakim dapat menetapkan nafkah *ma'adhiyah* atau nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan.

Dalam beberapa perkara yang menuntut nafkah *ma'adhiyah* ini tidak hanya menggunakan Yurispundensi atau pun landasan hukum formil maupun materiil, dalam perkara pembebanan agar suami membayar nafkah *ma'adhiyah* hakim memutuskan untuk mempertimbangkan secara *ex officio* (jabatan). Karena dalam hal ini bekas istri menanggung akibat yang lebih besar apabila terjadi perceraian terlebih ketika anak berada dalam asuhannya. Sementara lembaga peradilan dalam hal ini merupakan benteng terakhir bagi perempuan dan untuk menegakkan keadilan terhadap hak – hak mereka.

#### **4. Analisis Perbandingan Nafkah *Ma'adhiyah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum dibentuk dengan maksud untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara aman, tertib dan damai. Keamanan, ketertiban dan kedamaian yang dikehendaki oleh adanya hukum itu ialah suatu keadaan dimana setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil. Keadilan adalah tuntutan hati nurani setiap manusia namun keadilan bersifat universal. Oleh karenanya kebutuhan manusia atas hukum yakni agar memperoleh suatu keadilan.<sup>41</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia menganut dua sistem hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam memuat sumber hukum yang tercantum dalam Alqur'an, Hadits dan Ijtihad Ulama. Sedang Hukum Positif memuat hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No 9 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurispundensi atau keputusan hakim tedahulu. Dalam Hukum Islam permasalahan mengenai nafkah *ma<d{iyah* atau nafkah lampau dalam ijtidad ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah nafkah *ma<d{iyah* istri gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang apabila ditetapkan mahkamah.<sup>42</sup> Namun Jumhur ulama menetapkan nafkah istri tidak menjadi gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang yang kuat sehingga harus dibayarkan oleh suami atau dibebaskan oleh istri. Sedang mengenai nafkah *ma<d{iyah* anak ulama sepakat bahwa nafkah anak gugur apabila telah lewatnya masa, Namun ulama Syafi'iyah berpendapat nafkah *ma<d{iyah* anak menjadi hutang apabila berdasarkan putusan hakim.

Dalam hukum positif permasalahan nafkah *ma<d{iyah* ini kedudukannya dikabulkan atau ditolak ditentukan oleh hakim. Karena dalam hukum positif permasalahan mengenai nafkah *ma<d{iyah* tidak dibahas secara khusus. Namun hakim pengadilan agama dalam perkara perkara perkawinan mempertimbangkan hukum Islam dan hukum Islam dalam membuat putusan mengenai perkara yang menjadi persoalan. Disamping itu, dalam perkara nafkah *ma<d{iyah* ini juga memerlukan kewenangan hakim sehingga memutuskan secara *ex officio* karena kelalaian dalam memberi nafkah padah ia dalam keadaan mampu merupakan perbuatan yang dapat merugikan anggota keluarga. Putusan pengadilan agama harus menampakkan keadilan dan keberpihakan pada hak-hak perempuan khususnya hak nafkah yang terabaikan sehingga

menimbulkan beban dan akibat buruk bagi kaum perempuan karena tidak hanya menjadi orang yang diceraikan namun juga sebagai orang yang menanggung beban nafkah anak-anak yang dilahirkan.

Berdasarkan uraian penulis mengenai nafkah *ma'adhiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan mengenai nafkah *ma'adhiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif diantaranya :

1. Nafkah *ma'adhiyah* tidak menjadi gugur dan menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim
2. Permasalahan mengenai nafkah *ma'adhiyah* ini tidak diuraikan secara khusus tentang konsekuensi hukumnya melainkan berdasarkan putusan hakim.

Adapun perbedaan mengenai nafkah *ma'adhiyah* ini yakni :

1. Hukum Islam membahas mengenai nafkah *ma'adhiyah* dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda diantara ulama Mazhab. Sedang dalam hukum positif pembahasan mengenai nafkah *ma'adhiyah* tidak dibahas secara khusus dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dapat digugat berdasarkan putusan – putusan hakim mengenai perkara nafkah *ma'adhiyah* berbeda-beda, ada putusan yang mengabulkan seluruh permohonan mengenai nafkah *ma'adhiyah* , adapula putusan yang mengabulkan sebagian, dan ada pula yang menolak seluruh permohonan nafkah *ma'adhiyah* .

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Ma'adhiyah*

Dalam Perkara Cerai Gugat penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  terdapat beberapa pendapat hukum yakni : Menurut ulama Hanafiyah nafkah  $ma < d\{iyah$  istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumhur ulama nafkah  $ma < d\{iyah$  menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan menurut jumhur ulama nafkah  $ma < d\{iyah$  anak menjadi gugur dan bukan menjadi hutang bagi ayah karena pemberian nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat dan bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh anak.
2. Tinjauan Hukum Positif mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah  $ma < d\{iyah$  itu wajib dibayar atau tidak.
3. Perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  Berdasarkan uraian penulis mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif diantaranya :
  - a. Nafkah  $ma < d\{iyah$  tidak menjadi gugur dan menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim
  - b. Permasalahan mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  ini tidak diuraikan secara khusus tentang konsekuensi hukumnya melainkan berdasarkan putusan hakim.Adapun perbedaan mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  ini yakni:
  - a. Hukum Islam membahas mengenai nafkah  $ma < d\{iyah$  dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda



diantara ulama Mazhab. Sedang dalam hukum positif pembahasan mengenai nafkah *ma'andiyah* tidak dibahas secara khusus dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dapat digugat berdasarkan putusan – putusan hakim mengenai perkara nafkah *ma'andiyah* berbeda-beda, ada putusan yang mengabulkan seluruh permohonan mengenai nafkah *ma'andiyah* , adapula putusan yang mengabulkan sebagian, dan ada pula yang menolak seluruh permohonan nafkah *ma'andiyah*.

**Fitri Gamelia Harahap,** *Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Cetakan ke-4, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut-Lebanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cetakan Pertama.
- al-Syarqawi, Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, *Kitab Syarqawi alat tahrir* Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Amiriyah, Nuriel, "Nafkah Ma<d{iyah Anak Pasca Perceraian" dalam Jurnal Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No. 1 Tahun 2015. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugul al -Maram*, Penterjemah: Irfan Maulana Hakim Bandung : Khazanah, 2010 Cetakan I.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 10.
- Cholil, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Press, 2013.
- Djalal, Afifah, Salma, Elfia dan "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Ma<d{iyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam Istimbath : Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 16. No. 1 (2017) IAIN Mataram
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014. cetakan ketujuh.

- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hanafi, Ibnu Humam, *Syarab Fath al-Qadir*, Juz, IV, Penerjemah : Abdul Aziz Salman. Jakarta: Pustaka Azzam, 1988.
- Imam, Abu Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Rozi Al-Jashshosh Al-Hanafi, *Abkamul Qur'an*, Juz V, Beirut : DarulHaya'it Turots Al-Arobi, 1992.
- Khairani, "Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga", dalam Jurnal Takammul Vol. 1 No. 1. Januari-Juni, 2012., Pusat Studi Wanita IAIN Ar-RAniry Banda Aceh.
- Lopa, Baharudin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cetakan ke 1.
- Mudlor, A. Zuhdi dan Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1996.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/K/AG/2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah: Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Al Ma'arif, 1978. Jilid 6. Cetakan kedua puluh.
- H.S, Saim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas, *Nibayah al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa al-Baby al- Haby, t.t. Juz VII.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011 cetakan ketiga
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2010.

## Catatan Kaki

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), cetakan ketujuh, h. 22.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...h. 10.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah: Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Al Ma'arif, 1978), cetakan kedua puluh. Jilid 6 h. 8.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2011) cetakan ketiga, h. 159.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 37.

<sup>6</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2010) h. 152.

<sup>7</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul al -Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim (Bandung : Khazanah, 2010 ) Cetakan I, h. 266.

<sup>8</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*...h. 465.

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga* ..... h. 152.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan ke-4, 1997) h. 93.

<sup>11</sup> Saim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) h. 55.

<sup>12</sup> Tim Permata Press. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015), h. 14.

<sup>13</sup> Teks ini dapat dilihat dibelakang buku kutipan kata nikah

<sup>14</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1996) h. 1583

<sup>15</sup> Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Ma'diyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam Istimbath : Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 16. No. 1 (2017) IAIN Mataram

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002) h. 270

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2010) Edisi Ketiga. h. 145.

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*.... h. 145.

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran / Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 37.

- 
- <sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,.....h. 559.
- <sup>21</sup> Khairani, “Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga”, dalam Jurnal Takammul Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2012), Pusat Studi Wanita IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, h. 46.
- <sup>22</sup> Ibnu Humam Hanafi, *Syarab Fath al-Qadir*, Juz, IV, (Terj. Abdul Aziz Salman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 1988), h. 389.
- <sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazabib al-Arba’ah* (Beirut-Lebanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cetakan Pertama. h. 257.
- <sup>24</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 256.
- <sup>25</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, ( Mesir: Musthafa al-Baby al- Haby, t.t), Juz VII , h. 203.
- <sup>26</sup> An-Nawawi, *Majmu’ Syarab al-Muhazẓab*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), h. 267.
- <sup>27</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga ....*h. 161
- <sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*h. 132
- <sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*h. 130
- <sup>30</sup> Imam, Abu Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Rozi Al-Jashshosh Al-Hanafi, *Abkamul Qur’an*, Juz V, (Beirut : DarulHaya’it Turots Al-Arobi, 1992) h. 361
- <sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*h. 444
- <sup>32</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga ....*h. 162
- <sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*h. 132
- <sup>34</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga....*h. 163.
- <sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2004), h. 56.
- <sup>36</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015), h. 16.
- <sup>37</sup> Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi, *Kitab Syarqawi alat tahrir* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah , 1997 ) h 308
- <sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/K/AG/2003
- <sup>39</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* ( Malang : UIN Press, 2013), h. 273.
- <sup>40</sup> Nuriel Amiriyah, “Nafkah Ma<d{iyah Anak Pasca Perceraian” dalam Jurnal Jurisdicte : Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No. 1 Tahun 2015. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. h. 7.
- <sup>41</sup> Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cetakan ke 1 h. 3.
- <sup>42</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 10. h. 105

